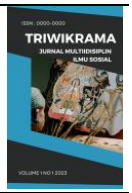
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN TANGERANG

Devi Pratiwi[1] , Yeni Widyastuti[2]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari 2026
Revised Januari, 2026
Accepted. Januari, 2026
Available online Januari, 2026

6661210025@untirta.ac.id
yeniwidyastuti@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Industri Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri lokal. Kabupaten Tangerang sebagai salah satu pusat industri di Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam pengembangan IKM, namun kontribusi sektor ini belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai instansi pelaksana program. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi aparatur Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, pengelola Gerai Tangerang Gemilang, serta perwakilan komunitas Industri Kecil Menengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi program dianalisis menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima aspek, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana–prasarana–teknologi, finansial, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dan didukung oleh regulasi serta anggaran daerah, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan program. Kendala utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis aparatur, kelembagaan Gerai Tangerang Gemilang yang belum optimal, pemanfaatan sarana dan teknologi yang belum maksimal, keterbatasan fleksibilitas anggaran, serta belum tersedianya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi kelembagaan dan fasilitas pendukung, peningkatan pemanfaatan teknologi, serta penyempurnaan regulasi teknis agar pelaksanaan program pembangunan IKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; industri kecil dan menengah; Kabupaten Tangerang;

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, serta penguatan identitas

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

budaya nasional. Ekonomi kreatif di Indonesia mencakup 17 subsektor, antara lain kuliner, fashion, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, media, seni pertunjukan, seni rupa, hingga penerbitan. Keberagaman subsektor tersebut mencerminkan potensi besar ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan sumber daya lokal. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari kinerja ekspor yang terus mengalami peningkatan. Data Badan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia mencapai 12,36 miliar dolar Amerika Serikat, atau mengalami peningkatan sebesar 4,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor tersebut masih didominasi oleh subsektor fashion, kriya, kuliner, dan penerbitan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor ekonomi kreatif nasional (Badan Ekonomi Kreatif, 2024). Capaian ini menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak lagi diposisikan sebagai sektor pendukung, melainkan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pembangunan nasional, pembangunan dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta memperkuat kehidupan demokratis yang berlandaskan Pancasila. Salah satu strategi utama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penguatan struktur ekonomi domestik, khususnya pada sektor industri kecil menengah. Industri Kecil Menengah memiliki peran strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Pemerintah juga memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah melalui penyusunan regulasi, pembinaan, fasilitasi, serta pengendalian kegiatan industri agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi pelaku industri kecil menengah, seperti keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, serta akses pasar. Oleh karena itu, pengembangan industri kecil menengah tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan publik yang berkelanjutan.

Gambaran Kualitatif mengenai perkembangan industri kecil menengah dapat dilihat dari data jumlah usaha mikro dan kecil per provinsi di Indonesia pada periode 2021–2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha mikro dan kecil menunjukkan tren yang bervariasi antarprovinsi, mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi, dukungan kebijakan, serta karakteristik wilayah masing-masing (BPS, 2025). Secara lebih spesifik, di Provinsi Banten, data persebaran industri kecil menengah berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan adanya ketimpangan jumlah pelaku industri kecil menengah antarwilayah. Beberapa kabupaten/kota memiliki konsentrasi industri kecil menengah yang relatif tinggi, sementara wilayah lainnya masih menunjukkan jumlah yang lebih rendah (BPS Provinsi Banten, 2025). Variasi persebaran tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan industri kecil menengah memerlukan pendekatan yang kontekstual dan berbasis wilayah. Daerah dengan jumlah industri kecil menengah yang besar membutuhkan strategi peningkatan daya saing dan perluasan pasar, sedangkan daerah dengan jumlah industri kecil menengah yang relatif kecil memerlukan dorongan dalam bentuk pembinaan, promosi, dan penguatan

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ekosistem industri. Dalam hal ini, dukungan promosi dan pemasaran lintas platform, baik secara konvensional maupun digital menjadi faktor agar pelaku industri kecil menengah mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kerangka kebijakan pengembangan industri kecil menengah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan mandat pemerintah untuk melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pengembangan pasar. Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020, yang mengarahkan penguatan ekosistem industri daerah melalui penyediaan infrastruktur industri, peningkatan akses permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar bagi pelaku industri kecil menengah. Berikut merupakan jumlah industri kecil menengah di Provinsi Banten menutut Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Pandeglang	19.546	16.368	10.380
2	Kabupaten Lebak	29.586	30.273	20.934
3	Kabupaten Tangerang	15.359	16.979	18.849
4	Kabupaten Serang	10.729	10.016	8.278
5	Kota Tangerang	10.347	10.410	15.999
6	Kota Cilegon	5.152	4.501	7.579
7	Kota Serang	4.486	4.770	5.159
8	Kota Tangerang Selatan	8.623	9.042	9.914

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025

Fokus penelitian ini diarahkan pada Kabupaten Tangerang, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan dinamika industri yang cukup kuat di Provinsi Banten. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tangerang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan perindustrian dan perdagangan. Kebijakan dan program daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing industri lokal. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa jumlah industri di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada periode 2023–2025. Namun demikian, laju pertumbuhan industri pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Disperindag Kabupaten Tangerang, 2025).

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Table 2. Jumlah Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2025

NO	Nama Industri	Jumlah Industri		
		2023	2024	2025
1	Industri Kecil	621	758	1.024
2	Industri Menengah	152	229	298
3	Industri Besar	415	821	946
4	*Unclassified* (Belum lapor)	1.227	855	778
Total Jumlah		**2.415**	**2.663**	**3.046**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, 2025

Selain itu, struktur industri di Kabupaten Tangerang tergolong beragam, meliputi industri karet dan plastik, kimia, logam, makanan dan minuman, serta sektor industri lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan. Meskipun memiliki potensi industri yang besar, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan daya saing daerah secara optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain terkait pengembangan produk yang belum inovatif, keterbatasan strategi pemasaran dan distribusi, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap program-program pemerintah daerah yang ditujukan untuk pengembangan industri kecil menengah.

Sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang didukung oleh Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, yang bertindak sebagai lembaga pengawas melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan bagi komunitas industri kecil dan menengah. Hingga saat ini, sejumlah komunitas industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang telah terdaftar secara resmi di Kantor Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat dan mengumpulkan data mengenai sektor industri regional.

Table 3. Jumlah Komunitas Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang

NO	Nama Komunitas Industri Kecil Menengah	Jumlah Anggota	
		2022/2023	2024
1	Komunitas Makanan dan Minuman	184	184
2	Komunitas Pakaian dan Kerajinan	45	45
3	Komunitas Industri Kreatif	70	70
4	Komunitas Alas Kaki	7	6
Total Jumlah		**307**	**306**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan inti dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang. Evaluasi ini difokuskan pada tiga isu utama, yaitu: (1) pelaksanaan pelatihan industri kecil menengah yang belum optimal, kurang terstruktur, dan belum

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

adaptif terhadap perkembangan teknologi, (2) promosi produk industri kecil menengah yang masih terbatas, termasuk pemanfaatan kanal marketplace yang belum aktif secara optimal, serta (3) sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi Gerai Tangerang Gemilang yang belum efektif, sehingga tingkat *awareness* masyarakat terhadap fasilitas tersebut masih rendah. Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan observasi awal dan hasil wawancara dengan pihak terkait, serta respons publik di media sosial yang menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peran dan manfaat Gerai Tangerang Gemilang. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi program, serta manfaat penelitian baik bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang maupun bagi peneliti dan akademisi selanjutnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi aktual implementasi program, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti memahami proses, dinamika, serta kebijaka, khususnya dalam melihat bagaimana program dijalankan, diterima, dan dirasakan oleh para pelaksana maupun sasaran kebijakan.

Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku subjek penelitian yang diamati secara langsung di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam implementasi program secara mendalam. Bogdan (1998) menegaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, sehingga sangat sesuai untuk mengevaluasi kebijakan publik yang sarat dengan interaksi antaraktor dan dipengaruhi oleh faktor struktural maupun kontekstual.

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah. Evaluasi program dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino, yang menilai implementasi kebijakan berdasarkan lima aspek utama, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana–prasarana–teknologi, finansial, dan regulasi (Agustino, 2023). Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran evaluatif yang komprehensif, tidak hanya pada capaian program, tetapi juga pada kesiapan dan dukungan sistem yang menopang pelaksanaan kebijakan.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat dan pegawai pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tangerang, pegawai Gerai Tangerang Gemilang, serta perwakilan komunitas industri kecil menengah dari berbagai subsektor, seperti makanan dan minuman, pakaian dan kerajinan, industri kreatif, serta industri alas kaki. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang kaya, mendalam, dan beragam terkait implementasi program dari sudut pandang pelaksana maupun penerima manfaat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam yang berpedoman pada indikator setiap aspek dalam model evaluasi kebijakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi resmi, laporan kegiatan, serta studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu, guna meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Wiersma, 1986; Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan penelitian yang mendalam dan tuntas (Miles et al., 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor industri kecil dan menengah. Program ini telah berjalan dan memberikan manfaat bagi sebagian pelaku industri kecil menengah, khususnya dalam aspek pembinaan dan fasilitasi usaha. Namun demikian, capaian program tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan daya saing industri daerah secara menyeluruh. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima aspek, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana–prasarana–teknologi, finansial, dan regulasi. Kerangka evaluasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesiapan sumber daya dan dukungan kebijakan mampu menunjang efektivitas implementasi program di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi sebagian pelaku IKM, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan penguatan daya saing industri daerah. Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima aspek, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana–prasarana–teknologi, finansial, dan regulasi. Secara umum, program telah memiliki dasar perencanaan dan struktur pelaksanaan yang jelas, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi teknis, koordinasi, dan pemanfaatan fasilitas pendukung.

Table 4. Temuan Lapangan

Indikator	Temuan Lapangan
Sumber Daya	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk program industri

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Aparatur	kecil menengah masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah industri kecil menengah yang harus dibina 2. Kesenjangan kompetensi di mana sebagian besar aparatur memiliki latar belakang pendidikan non-teknis industri, sehingga sulit memberikan pendampingan yang mendalam tentang desain produk atau efisiensi produksi. 3. Aparatur sudah memahami tupoksi masing-masing, tetapi implementasinya kadang terkendala beban kerja dan rotasi internal.
Kelembagaan	1. Struktur organisasi Disperindag sudah tersusun jelas dan masing-masing bidang memahami tanggung jawabnya. 2. Fungsi kelembagaan dalam mendukung program industri kecil menengah sudah cukup, akan tetapi koordinasi antar banyak bidang belum berjalan optimal. 3. Koordinasi dengan pihak swasta masih lemah, terbukti dengan rendahnya jumlah industri kecil menengah yang difasilitasi mendapat akses modal atau pasar digital.
Sarana,Prasarana dan Teknologi	1. Fasilitas pelatihan dan sentra industri kecil menengah telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi. 2. Rumah Kemasan Kabupaten Tangerang belum maksimal digunakan karena keterbatasan alat dan keterbatasan SDM pendamping. 3. Beberapa peralatan produksi yang tersedia masih dianggap kurang mendukung kebutuhan pelaku industri kecil menengah. 4. Tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku industri kecil menengah masih rendah, terutama dalam hal pemasaran online. 5. Kurangnya workshop teknologi membuat adaptasi digital pelaku IKM berjalan lambat.
Finansial	1. Alokasi anggaran untuk program industri kecil menengah ada setiap tahun, namun masih belum mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan promosi. 2. Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan, keterbatasan anggaran membuat kegiatan berbeda-beda setiap tahun. 3. Prioritas anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan event atau pameran dan pelatihan daripada peningkatan kapasitas bagi pelaku industri kecil menengah. 4. Pelaku industri kecil menengah masih mengandalkan biaya pribadi untuk promosi seperti packaging, pemasaran digital, atau pengembangan produk.

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Regulasi	1. Regulasi dasar seperti Peraturaan Bupati atau aturan teknis terkait pembinaan industri kecil menengah sudah ada, namun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aparatur. 2. Kurangnya sosialisasi mengenai Perbup tersebut baik kepada pegawai internal Disperindag maupun kepada para pelaku industri kecil menengah. 3. Belum ada media sosialisasi regulasi yang rutin, baik melalui website, grup komunitas, maupun kegiatan tatap muka, sehingga informasi tidak merata ke seluruh pelaku industri kecil menengah.

Sumber: Penulis, 2025

Pada aspek sumber daya aparatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang secara umum telah memiliki kompetensi dasar dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri kecil menengah. Aparatur terlibat dalam berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi program. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, sumber daya aparatur telah tersedia dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pembinaan industri kecil menengah belum sepenuhnya ideal apabila dihadapkan pada jumlah dan keragaman kebutuhan pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang. Aparatur yang terlibat dalam pembinaan harus melayani pelaku industri kecil menengah dengan karakteristik usaha yang beragam, sehingga intensitas pendampingan yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh pelaku industri kecil menengah secara optimal. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan yang masih bersifat selektif dan bergiliran, sesuai dengan prioritas program dan ketersediaan sumber daya yang ada.

Selain itu, dari sisi substansi pelatihan, materi yang diberikan kepada pelaku industri kecil menengah umumnya telah mencakup aspek dasar pengelolaan usaha, produksi, dan pengemasan. Namun, penyesuaian materi terhadap perkembangan kebutuhan industri, khususnya terkait pemanfaatan teknologi digital, masih perlu ditingkatkan. Pelatihan mengenai pemasaran digital, penguatan merek, dan pemanfaatan platform marketplace telah mulai diperkenalkan, tetapi belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam dan terstruktur. Hal ini menyebabkan dampak pelatihan terhadap peningkatan daya saing produk industri kecil menengah belum dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas dasar aparatur telah mendukung pelaksanaan program, penguatan kapasitas aparatur tetap diperlukan agar peran aparatur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping usaha yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaku industri kecil menengah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi teknis aparatur secara berkelanjutan serta penyesuaian pendekatan pembinaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas Program Perencanaan dan Pembangunan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang..

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dari aspek kelembagaan, struktur organisasi Disperindag Kabupaten Tangerang telah mendukung pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan industri kecil menengah melalui pembagian tugas yang jelas, khususnya pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi internal antarbidang serta koordinasi eksternal dengan pemangku kepentingan lain, seperti komunitas industri kecil menengah dan pihak swasta, belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kurang terintegrasinya program pembinaan, promosi, dan pemasaran industri kecil menengah. Selain itu, peran Gerai Tangerang Gemilang sebagai wadah promosi dan pemasaran produk IKM belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan pelaku industri kecil menengah, yang mengindikasikan lemahnya fungsi kelembagaan dalam aspek diseminasi informasi dan sinergi antaraktor.

Pada aspek sarana, prasarana, dan teknologi, penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pendukung, termasuk Gerai Tangerang Gemilang sebagai etalase produk industri kecil menengah. Namun, pemanfaatan sarana tersebut masih belum optimal. Beberapa fasilitas teknologi, seperti platform digital dan kanal marketplace, belum dikelola secara aktif dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi pemasaran digital yang seharusnya dapat memperluas jangkauan pasar produk industri kecil menengah belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sarana dengan kemampuan dan strategi pemanfaatannya, baik oleh aparatur maupun pelaku industri kecil menengah.

Dari aspek finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan program bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan telah dialokasikan secara rutin. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi program, khususnya dalam pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan, promosi skala besar, serta pengembangan teknologi pendukung. Selain itu, dukungan permodalan bagi pelaku IKM belum terintegrasi secara langsung dengan program pembinaan, sehingga dampak finansial program terhadap peningkatan kapasitas usaha industri kecil menengah masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif serta kolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas sumber pendanaan.

Pada aspek regulasi, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan industri kecil menengah telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut memberikan legitimasi dan arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan industri kecil menengah. Namun, dalam implementasinya, regulasi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam petunjuk teknis yang operasional dan mudah dipahami oleh pelaku industri kecil menengah. Akibatnya, sebagian pelaku industri kecil menengah belum memahami secara utuh hak, kewajiban, serta peluang yang dapat dimanfaatkan melalui program pemerintah.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa program perencanaan dan pembangunan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang telah berjalan sesuai kerangka kebijakan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis, koordinasi, dan pemanfaatan fasilitas. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi pelatihan yang belum

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

optimal dan adaptif terhadap teknologi, promosi produk yang masih terbatas, serta rendahnya tingkat awareness masyarakat terhadap Gerai Tangerang Gemilang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi kelembagaan, optimalisasi sarana dan teknologi digital, serta strategi promosi dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar tujuan pengembangan IKM dapat tercapai secara optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator:

Dari aspek sumber daya aparatur, aparatur memiliki peran strategis dalam perencanaan, pembinaan, dan evaluasi program, serta telah menunjukkan komitmen melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, kompetensi teknis aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bidang industri akibat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, sehingga penguatan kapasitas teknis masih diperlukan agar program dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Pada aspek kelembagaan, struktur organisasi dan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Perindustrian dan Bappeda, telah berjalan cukup baik dalam mendukung perencanaan program. Meski demikian, kelemahan masih ditemukan pada tingkat layanan, terutama di Gerai Tangerang Gemilang yang belum memiliki struktur kelembagaan yang optimal, sehingga fungsi promosi dan pemasaran produk industri kecil menengah belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan pada unit pelaksana lapangan.

Aspek sarana, prasarana, dan teknologi menunjukkan bahwa fasilitas pendukung program, seperti Rumah Kemasan dan peralatan produksi, telah tersedia, namun pemanfaatannya belum optimal. Keterbatasan alat, kebutuhan operator khusus, serta rendahnya kemampuan aparatur dan pelaku industri kecil menengah dalam pemanfaatan teknologi digital menjadi kendala utama. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi turut membatasi efektivitas pendataan dan promosi produk IKM. Dari sisi finansial, program telah didukung oleh anggaran rutin dari APBD yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan. Namun, keterbatasan jumlah dan fleksibilitas anggaran menyebabkan tidak semua kebutuhan program dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, optimalisasi pengembangan industri kecil menengah memerlukan dukungan anggaran yang lebih proporsional, fleksibel, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada aspek regulasi, program telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui RPJMD, Renstra, dan peraturan daerah terkait pembangunan industri. Akan tetapi, belum tersedianya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan khusus untuk program industri kecil menengah menjadi kelemahan penting dalam implementasi kebijakan. Penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan sosialisasi, serta penyesuaian aturan dengan kebutuhan pelaku industri kecil menengah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id



5. Daftar Pustaka

Afandi. (2024). *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Gowa.*

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Alfabeta.

Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis dan Praktis.* Empatdua Media.

Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik.* CV. Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025). Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/09/16/a83f105e49377d0a7434e62a/profil-industri-mikro-dan-kecil-2024.html

Bogdan, R. C. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (2nd ed.). Allyn and Bacon.

Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Evaluasi program usaha mikro, kecil, dan menengah (model kewirausahaan sosial di Kota Serang). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 15*(2), 60–73. https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17529

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* SAGE Publications.

Pardede, M., Ramadhona, R., & Dwiputrianti, S. (2022). Evaluasi program pengembangan industri kecil sektor kuliner di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 290–296.

Peraturan Bupati Tangerang No 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Seta Tata Cara Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2023). Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/279505/perbup-kab-tangerang-no-16-tahun-2023

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Good Governance.* UNG Press.

Utami Damayanti, C., Agustino, L., & Maisaroh, I. (2023). Evaluasi program pengembangan industri kecil dan menengah pada pengrajin tahu di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4*(2), 1–13. https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.130

Wiersma, W. (1986). *Research Methods in Education: An Introduction* (4th ed.). Allyn and Bacon.

*Corresponding author
E-mail addresses: 6661210025@untirta.ac.id